

## **WAWASAN ETIKA POLITIK, MEMBANGUN SIKAP KRITIS DAN RASIONAL POLITIK BANGSA**

**M. Sidi Ritaudin**

### **Absrak**

Salah satu dimensi pendidikan politik adalah membuka wawasan etika politik yang diniscayakan dapat membangun sikap kritis dan rasional politik anak bangsa. Karena etika bersumber dari ilmu agama, sementara modal agama merupakan anasir pokok dalam pembentukan ciri utama kebudayaan yang berkeadaban tinggi, maka ia berfungsi sebagai ilmu, dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Oleh karena itu tindakan politik harus dalam kondisi sadar, yaitu kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan solidaritas, secara otomatis akan melahirkan perilaku dan keputusan serta aksi politik yang jauh lebih etis.

**Kata Kunci: Etika politik, sikap kritis, Sikap Rasional**

### **Pendahuluan**

Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pengamat politik berpandangan sinis: "Berbicara etika politik itu seperti berteriak di padang gurun." "Etika politik itu nonsens". Realitas politik adalah pertarungan kekuatan dan kepentingan. Politik dibangun bukan dari yang ideal, tidak tunduk kepada apa yang seharusnya. Dalam politik, kecenderungan umum adalah tujuan menghalalkan segala cara. Meskipun Nietzsche dengan lantang meneriakkan bahwa essensi etika dalam politik dibangun dan ditentukan oleh penilaian baik dan buruk, Nilai-nilai timbul dalam keadaan amarah dan kekuasaan, tetapi nilai

etik dalam politik ini mampu menciptakan perubahan<sup>1</sup> tetapi pragmatisme politik agaknya sudah merasuk begitu jauh, tidak lagi pada tataran penguasa bahkan telah berkolaborasi dengan rakyat yang dibuktikan dengan adanya *money politic* (transaksional politik) dalam Pemilihan umum.

Dalam konteks ini, bagaimana etika politik bisa berbicara, Inilah pandangan sekuler mengenai kekuasaan dan politik yang tidak sedikitpun diikat dengan agama. Menurut pandangan Islam, tanpa pengetahuan yang luas dan kuat yang bertumpu pada ilmu pengetahuan keagamaan yang paling luhur (*'ulúm al-dîn*) maka tidak akan ada realisasi etika dalam politik<sup>2</sup> sebut saja misalnya bahwa secara empiris kasat mata perilaku elite politik yang tidak mendidik rakyatnya dengan melakukan politik uang, politik transaksi. Di sinilah agaknya relevansi etika politik Islam versi Nabi saw, yaitu diri sendiri yang harus menjadi contoh, suri tauladan, *qudwah hasanah* bagi rakyat yang dipimpinnya, meliputi perilaku, moral dan kebaikan berupa nilai, kesabaran, kesederhanaan, persamaan, keadilan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Meskipun al-Mawardi mengutamakan ilmu-ilmu agama (*'ulúm al-dîn*) ia menekankan keterkaitan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Mempelajari al-Qur'ân meningkatkan derajat, fikih akan meningkatkan kemuliaan, hadis memperkuat hujjah, matematika (IPA) kemampuan akal, dan bahasa memperindah seni,<sup>4</sup> dan penulis tambahkan bahwa mempelajari ilmu politik memperkuat akidah. Hal ini karena nomenklatur ilmu politik mendahului ilmu akidah, pada waktu Rasulullah saw menerima wahyu, persoalan pertama muncul adalah persoalan politik, Rasulullah saw melakukan hijrah dan

---

<sup>1</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 722.

<sup>2</sup>Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Mesir : Al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1375 H/ 1955), h. 44.

<sup>3</sup>M. Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Buku Daras), (Jakarta : Transmisi Media, 2009), h. 34.

<sup>4</sup>Pandangan Islam ini diambil dari Al-Mawardi yang mengutip pandangan Imam Syafi'i, lihat, Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 329-330.

menyusun kekuatan politik dan mendirikan negara, persoalan teologi muncul belakangan, tidak lebih dari mencari legitimasi agama untuk kekuasaan, sebut saja misalnya peristiwa tahkim/ arbitrase, dan menurut Imam Hasan Albanna, tidak sempurna iman seseorang itu jika ia belum berpolitik (baik mempelajari maupun aksi).

Tesis keagamaan, secara filosofis konstitusional menempati posisi strategis dan aspiratif. Salah satu kemungkinan strategis dalam perjuangan melawan kejahatan extra ordinary korupsi ialah melalui sisi agama, karena modal agama merupakan anasir pokok dalam pembentukan ciri utama kebudayaan timur, termasuk Indonesia.<sup>5</sup> Gejala kembali ke agama menunjukkan trend positif, yang berkembang dewasa ini, termasuk pada dunia politik. Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel maka tidak ada cara lain kecuali dengan etika keagamaan.<sup>6</sup> Agaknya dalam menghadapi perilaku korup oknum penguasa dan berakibat carut marutnya negara, maka posisi etika politik menemui relevansinya.

### **Urgensi Etika Politik Islam**

Kalau orang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui *civil society*,<sup>7</sup> membangun demokrasi, bukankah semua itu merupakan upaya mewujudkan etika politik pada realitas empiris. Dalam situasi kacau, terutama tidak adanya sinkronisasi antar berbagai lembaga negara, seperti polisi,

---

<sup>5</sup>Adi Sasono. "Moral Agama dan Masalah Kemiskinan Pengantar Kajian Tentang Misi Islami dalam Pembangunan Nasional", dalam, M. Amien Rais, Ed, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta : Srigunting, RajaGrafindo Persada, 1996), h. 106.

<sup>6</sup>Bedah Editorial Media Indonesia di Metro TVm *Menggariskan Kepatuhan*, Rabu, 24 September 2014.

<sup>7</sup>Di Indonesia, terminologi *civil society* oleh Nurcholish Madjid diintrodusir menjadi masyarakat madani sebagai padanannya, sebagai model acuan tentang lingkup interaksi sosial. Lihat. Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 236-237.

hakim dan jaksa, sehingga diperlukan lembaga adhoc KPK, ternyata hanya menambah cost negara, sebab korupsi semakin merajalela, bukankah etika politik menjadi makin relevan. Paling tidak, dalam analisis ditemukan tiga hal mendasar pentingnya etika agama dalam realitas politik, yaitu :

**Pertama**, betapa kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi. Legitimasi tindakan ini mau tidak mau harus merujuk pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan. Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas.

**Kedua**, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi *indignation* (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar. Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik.

**Ketiga**, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil. Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik. Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Terminologi etika, sebagaimana para ahli lainnya, disusun oleh Al-Jurjani dengan mensinonimkannya dengan pengertian akhlak, yaitu perilaku yang melekat pada jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa memerlukan pikiran (berat) apabila ia mendorong perbuatan yang baik menurut akal dan syara', maka ia dinamakan etika atau akhlak yang baik. Sedang jika ia melahirkan perbuatan buruk, maka dinamakan etika atau akhlak yang buruk.<sup>8</sup>

Namun demikian sebagian para ahli berpendapat bahwa etika itu adalah cabang filsafat yang membahas baik dan buruknya tindakan manusia, yang mencari kebenaran, dan sebagai filsafat ia mencari

---

<sup>8</sup>Muhammad Al-Jurjani, *at-Ta'rifat*, (Singapore: al-Haramain, 1321. H), Cet. I. h. 70.

keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi etika, ia mencari ukuran baik-buruknya suatu tingkah laku manusia; etika hendak mencari, tindakan manusia yang manakah yang baik.<sup>9</sup> Mengingat tindakan manusia itu ada yang disengaja dan ada pula yang tidak disengaja, maka hanya tindakan manusia yang disengaja sajalah yang menjadi sorotan etika, yakni tindakan yang dihasilkan dari kehendaknya, tindakan yang sudah dipikirkan sebelumnya.<sup>10</sup> Jadi etika tidak berlaku bagi orang gila atau tidak sadar.

Etika politik secara ketat berlaku bagi para pelaku politik, meskipun pada awalnya ia mengatakan bahwa saya sendiri bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya tidak bergairah untuk ikut-ikutan kampanye dan berada di kubu ini atau itu. Tentu saja saya punya pilihan, dan mencoblos. Sebagai warga negara saya punya hak suara dan saya menggunakannya. Sebut saja misalnya pidato singkat Zulkifli Hasan sebelum voting menjadi ketua MPR, ia mengatakan bahwa dia tidak bermimpi atau merencanakan untuk menjadi ketua MPR, tapi hal ini adalah garis tangannya. Perspektif etika politik, ia harus memenuhi semua kompetensi dan kapabilitas sebagai ketua MPR beserta syarat rukunnya.

Mengapa ia harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai Ketua MPR, karena etika politik itu membicarakan masalah predikat-predikat nilai “betul” (“right”) dan “salah” (“wrong”) dalam arti “susila” (“moral”) dan “a susila” (immoral)<sup>11</sup> Kattsoff menjelaskan bahwa etika digunakan: *pertama*, sebagai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia, tentu saja dalam hal ini, menyangkut perbuatan politik dan dipakai untuk membedakan perbuatan-perbuatan

---

<sup>9</sup>Carl Wellman, *Morals and Ethics*, (New Jersey: Prentice-Hall, 1988), Englewood Cliffs, Ed.2, h.6.

<sup>10</sup>Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 5-6.

<sup>11</sup>Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986) h. 349.

atau manusia-manusia yang lain.<sup>12</sup> Sehingga oleh Lillie, etika digolongkan sebagai ilmu pengetahuan normatif yang bertugas memberikan pertimbangan perilaku manusia dalam masyarakat apakah baik atau buruk, benar atau salah, sebagaimana pernyataannya berikut ini :

*“The normative science of the conduct of human being living in societies is a science which judge this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way. This definition says, first of all, that ethics is a science, and science may be defined as a systematic and mor or less complete body of knowledge about a particular set of related events or objects”*<sup>13</sup>.

Dengan demikian, etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, karena ia berfungsi sebagai ilmu, dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri.<sup>14</sup> etika kajiannya lebih radikal, abstrak dan filosofis. Dalam hal ini nampaknya para ahli di bidang ini, tidak ada pertentangan tentang fungsi dan manfaat etika bagi kehidupan manusia, baik bersifat individu, kelompok maupun masyarakat luas di dalam segala bidang. Di bidang politik, etika kepemimpinan, etika penguasa tentu saja memegang peranan penting.

---

<sup>12</sup>Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986) h. 351. Menurut Richard B. Brandt etika ada dua, yaitu *pertama* etika normatif, yang tugasnya mengadakan penyeleksian terhadap ukuran-ukuran kesucilaan yang dianggap benar dan berlaku dalam masyarakat. Juga di dalamnya diselidiki dasar dari ukuran-ukuran tersebut. *Kedua*, etika kritik, yang tugasnya menelaah arti dari istilah-istilah yang digunakan dalam mengadakan tanggapan-tanggapan kesucilaan, seperti istilah “baik”, “buruk”, “wajib”, “bebas”, dan sebagainya. Etika kritik biasanya juga dinamakan etika kefilosofatan, atau sebagaimana yang diusulkan oleh Ayer, yakni “metaetika”. Lihat, Richard B. Brandt, *Ethical Theory, The Problems of Normative and Critical Ethics*, (Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, Inc, 1959).

<sup>13</sup>William Lillie, *An Introduction to Ethics*, (New York: Barnes Noble, 1957), h. 1-2.

<sup>14</sup>Franz Van Magnis, *Etika Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975) h. 13.

Jika perbuatan-perbuatan itu direalisasikan berupa perbuatan yang baik maka hal itu disebut akhlak yang baik. Sebaliknya, bila apa yang direalisasikan itu perbuatan yang jelek maka berarti seseorang tersebut bermoral yang jelek.<sup>15</sup> Karena itu, pelajaran budi pekerti harus menekankan perjumpaan, pengenalan, dan pemahaman “yang lain” (*the others*). Strategi pedagogis ini tentu membidik target jangka panjang. Strategi yang amat menentukan cerah-tidaknya masa depan demokrasi di negeri ini<sup>16</sup>.

### **Integritas Kenegarawanan dalam Politik Empirik**

Pembahasan tentang integritas kenegarawanan ini, kiranya lebih meresap jika diawali dengan sebuah adagium yang sangat populer di kalangan muslim terpelajar, yaitu berbentuk syair Arab, yang merupakan gubahan penyair kondang yang bernama Syauqi Bek. Bunyi lengkap dari syair tersebut adalah:

**انما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا**

“*Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya tegak; dan jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pulalah bangsa-bangsa itu*”.

Ratapan atau jeritan suara hati sang penyair ini muncul, menurut penuturan Rachmat Djatnika, adalah karena ia melihat fakta dan realita, yaitu kejatuhan Andalusia di Spanyol yang pada masa jayanya memiliki keajaiban dunia dengan istana Al-Hambra, mesjid Cordova. Andalusia pun telah melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rusyd, Ibnu Hazm, Al-Qurthubi Ibnu Al-‘Arabi dan lain-lain.

---

<sup>15</sup>Tentang perbuatan baik dan buruk ini Miskawaih menyebutnya sebagai karakter (*khuluk*) merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam, *pertama* alamiah dan bertolak dari watak, *kedua* tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Untuk bacaan lebih lanjut, lihat. Ibn Miskawaih, *Tahzib al-Akhlak*, Terj. Helmi Hidayat “*Menuju Kesempurnaan Akhlak*” (Bandung: Mizan, 1999) h. 56-58

<sup>16</sup> Donny Gahril Adian, “Menyoal Dimensi Kultural Demokrasi“, *Kompas*, Opini, 22 Juli 2002.

Namun, pada tahun 1492, negeri itu hilang kejayaannya, umat Islam lenyap dari Andalusia, disebabkan oleh ulah para pemimpinnya yang tidak bertanggung jawab terhadap nasib umat, melainkan saling bertengkar memperebutkan kedudukan dan kepentingan sendiri-sendiri, padahal musuh mengintai. Mereka lupa akan kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin terhadap nasib masyarakat dan bangsanya. Akhirnya mereka dapat dihancurkan oleh Raja Ferdinan dari Aragon dan sekutunya raja dari Castila.<sup>17</sup>

Dengan demikian, kejayaan suatu bangsa tergantung kepada keteguhan akhlak, budi pekerti, atau moral bangsa itu. Sebaliknya, kerusakan yang timbul di muka bumi ini adalah disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Dalam al-Qur'an disebutkan :

**ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس (الروم / : )**

*"Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan, disebabkan perbuatan manusia"*. (Q.S. *al-Rum.*/ 30 : 41).

Jadi, adanya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pencemaran lingkungan, terkurasnya sumber daya alam, krisis keluarga, kecanduan obat bius, prustitusi, gangguan jiwa dan sebagainya. Karena pentingnya kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia, maka misi (*risalah*) Rasulullah SAW, itu sendiri keseluruhannya adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Sebagaimana sabdanya:

**انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق**

*"Sesungguhnya saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"*. (HR. Ahmad Ibn Haubab).

Menurut pendapat Nurcholish Madjid, tidak ada bukti kebenaran adagium di atas yang lebih demonstratif daripada apa yang dapat disaksikan di zaman modern ini. Jika pengertian akhlak yang

---

<sup>17</sup> Lihat, Rachmat Djatnika, *Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia)*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992). h. 14-15. Konfirmasi tentang Andalusia ini dapat juga dilakukan pada, Harun Nasution (Ket.Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 120-121.



## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK..

amat luas dibatasi hanya kepada pengertian etika politik, maka sudah merupakan pendapat para pakar ilmu-ilmu sosial, bahwa bangsa yang kuat (dan maju) adalah bangsa yang etikanya tegar, tidak lemah.<sup>18</sup> Bagaimana etika politik yang tegar itu ? Agaknya yang dimaksudkan adalah sejauhmana para pejabat pemerintah dan orang-orang yang berfungsi sebagai *public figure* dapat menjadi “suri tauladan” bagi masyarakat.

Nurcholish Madjid mencontohkan Amerika Serikat sebagai negara yang etika politiknya kuat, karena ia tidak mentolerir bentuk penyelewengan apapun yang dilakukan oleh warga negara, apa lagi pejabat yang akan banyak mempengaruhi publik. Ia mencatat, misalnya, Gary Hart, seorang bakal calon presiden yang amat cerah dan memberi harapan, jatuh tak tertolong hanya karena di suatu malam Minggu, ketika istrinya pulang mudik ke Denver, Colorado. Flatnya di Washington terlihat dimasuki seorang wanita, yang ternyata seorang foto model dari Miami, Florida, bernama Donna Rice. Usut punya usut, ternyata wanita itu telah dipacari sejak lama. Maka jika kepada istrinya saja, Gary Hart berlaku curang, bagaimana kepada bangsa dan masyarakatnya ? Oleh karena itu, dalam hal etika politik, negeri seperti Amerika Serikat itu disebut Gunner Myrdal “negeri tegar” (*tough state*).

Nampaknya kejatuhan Gary Hart itu seperti suatu bentuk kemunafikan Amerika, karena bukankah di sana *free sex* dikenal luas Tapi untuk memahaminya, lanjut Nurcholish, mungkin harus dilihat bagaimana mereka membedakan antara suatu tindakan pribadi dan tindakan yang bisa mempengaruhi masyarakat luas karena dilakukan oleh seorang *public figure*.<sup>19</sup> Inilah apa yang disebut dengan pelanggaran etika politik, karena dampaknya yang menembus lapisan sosial yang luas, berlainan dengan etika pribadi, yang dampak

---

<sup>18</sup>Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2002) h. 184.

<sup>19</sup>Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2002) h. 184.

pelanggarannya hanya menyangkut pribadinya sendiri. Untuk memperluas ilustrasi baiklah dikemukakan beberapa contoh berikut ini.

Contoh etika pribadi: Katakanlah seseorang yang telah berhasil memperkembangkan bisnisnya sehingga menjadi seorang jutawan. Dari kekayaannya itu sebahagian dihamburkannya untuk menjinakkan dan memikat istri-istri orang lain, sehingga merusak hubungan keluarga. Memang ia berhasil memperkembangkan kekayaannya, tetapi gagal memperkembangkan etika pribadinya. Karena ia memikat istri orang lain, hal tersebut dicela oleh seluruh masyarakat, ia merusak kaidah etika yang berlaku dengan memikat istri orang lain dan merusak hubungan suami istri. Sebagai akibatnya turut menganiaya dan merusak pendidikan anak-anak keluarga tersebut secara tidak langsung.

Contoh etika politik: Seorang pejabat pemerintah mempergunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tiap warga negara Indonesia mengetahui bahwa uang pemerintah adalah uang rakyat. Setiap uang rakyat oleh siapa pun tidak boleh digunakan untuk pribadi dan harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal inilah kaidah etika politik tidak mengizinkan mempergunakan uang pemerintah untuk kepentingan pribadi, sebab hal ini mengganggu jalannya roda pemerintahan. Pejabat tersebut merusak etika politiknya, karena ia telah disumpah untuk lebih mementingkan negara daripada dirinya, bekerja dengan jujur, tertib dan cermat untuk kepentingan negara.

Pada akhir tahun 70an, P.M. Takeo Miki dari Jepang mengundurkan diri. Ia merasa bertanggungjawab atas kemerosotan popularitas Partai Liberal Demokrat. Ia “tahu diri” dan merasa bertentangan dengan etika politik jika lebih lama mempertahankan jabatannya. Dalam hal etika politik, Jepang adalah juga “negeri tegar” dari contoh tadi nampak bahwa tradisi pejabatnya yang mengundurkan diri (dulu malah *harakiri*)<sup>20</sup> jika kedapatan dirinya atau

---

<sup>20</sup>Harakiri adalah bentuk bunuh diri yang seremonial di Jepang, yang dilakukan dengan menyobek perut memakai pedang pendek. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995). h. 340.

## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK..

bawahannya melanggar etika politik. Korea Selatan, pelopor NIC's (*Newly Industrializing Countries*) adalah "negeri tegar", terlihat dari bagaimana mereka memberantas korupsi ke akar-akarnya, seperti yang terjadi terhadap mantan presiden mereka, Chun Doo Hwan.<sup>21</sup>

Bagaimana dengan Indonesia ? Agaknya jika dilihat dari beberapa indikator tentang kategori "negara tegar", maka tidak berlebihan bila Gunnar Myrdal telah menggolongkan Indonesia ini ke dalam kelompok *soft states*, "negeri lunak", yaitu dari segi etika politiknya. Sebab Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dewasa ini merajalela merasuki semua sektor birokrasi, tragis memang, karena Indonesia termasuk kategori negara beragama, dan 90 % adalah beragama Islam, yang secara substantif seluruh isi dan kandungan kitab sucinya (al-Qur'an) adalah pesan moral.

Hubungan antara *soft states* dengan *akhlak* seringkali disalahpahami, yaitu ketika orang mengatakan bahwa nilai "maaf" dapat menyelesaikan kesalahan publik. Dengan kata lain, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari caranya menghadapi atau bertindak terhadap kesalahan. Apakah bangsa yang lembek atau bangsa yang tegar. Dan lembek atau tegar itu bertautan pula dengan, setidaknya, dua sistem besar, yaitu sistem hukum dan sistem nilai atau kebudayaan.

Mengenai hal tersebut, dalam sebuah editorial,<sup>22</sup> dikatakan bahwa bangsa yang tegar, baik karena hukum ataupun kultural, akan tegar pula memperlakukan kesalahan. Kesalahan besar dihukum berat, kesalahan kecil dihukum ringan. Tidak peduli yang melakukannya anak sendiri, lurah, menteri, atau presiden, tanpa pandang bulu. Bahkan bangsa yang kebudayaannya menjunjung tinggi harga diri dan rasa malu tidak perlu menunggu hukuman dari luar. Otomatis, ia akan menghukum dirinya sendiri. Misalnya kesalahan ringan

---

<sup>21</sup>Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995). h, 185.

<sup>22</sup>Lidah Memang Tidak Bertulang, "Editorial", *Media Indonesia*, (Jakarta), No. 7969. Tanggal 23 Agustus 2002, h.1.

mengundurkan diri dari sebuah jabatan, sedangkan kesalahan besar melakukan harakiri alias bunuh diri.

### **Substansi Muatan Etika Politik**

*Power tends to corrupt* dan *Ethics has no place in politics* adalah dua adagium klasik dalam *textbook* ilmu politik yang ingin menunjukkan betapa mudahnya para politisi/elite politik terperangkap pada kecenderungan berpolitik tanpa etika. Sebaliknya, adagium ini pulalah yang membuat paea teoritikus/akademisi untuk selalu tidak jenuh dan letih meneriakkan perlunya etika politik dalam mengemban tugas dan tanggung jawab bermasyarakat dan bernegara.<sup>23</sup> Dalam teori politik, etika politik bukanlah sekadar gagasan himbauan moral yang naif bila dikaitkan dengan kehidupan politik praktis seperti sinyalemen adagium di atas.

Minimum ada tiga prinsip yang secara metodologis dapat dijadikan untuk mengukur muatan etika politik dari sebuah politik atau pun kebijakan publik<sup>24</sup>. Prasyarat *pertama* adalah prinsip kehati-hatian (*principle of prudence*), sebuah prinsip yang “mempertanyakan” secara kritis tentang latar belakang berikut “pemihakan” dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dari para pemegang kunci kekuasaan politik. Dalam prinsip ini, sebuah tindakan yang memiliki motif untuk “memihak” kepentingan lebih luas dibanding dengan kepentingan sempit partai atau diri sendiri akan memiliki nilai etika yang jauh lebih tinggi dan terpuji.

Prinsip *kedua* adalah prinsip tatakelola (*principle of governance*) yang berhubungan dengan masalah etika di dalam “proses” pengambilan keputusan ataupun penentuan tindakan. Prinsip ini menyangkut pengukuran terhadap standar-standar yang digunakan di dalam menentukan sebuah tindakan ataupun kebijakan. Kesadaran

---

<sup>23</sup>Sri Sultan Hamangkubowono X, *Pidato Dies* yang disampaikan dalam Temu Akbar Alumni Dies Natalis Ke-40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Agustus 2008.

<sup>24</sup>Kastorius Sinaga, “Tentang Etika Politik“, Kompas, 9 April 2008.

akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan soladiritas, secara otomatis, akan melahirkan perilaku dan keputusan yang jauh lebih etis.

Prinsip yang *ketiga* adalah prinsip pilihan rasional (*principle of rational choice*) yang secara metodologis menimbang secara seksama atas manfaat dan biaya (*costs and benefits*) dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kepentingan umum. Sebuah tindakan atau keputusan yang memiliki manfaat yang sangat tinggi dan signifikan bagi kepentingan umum jauh lebih etis dibanding tindakan yang hanya melayani kepentingan pribadi ataupun kepentingan manuver partai politik yang sesaat. Dalam kehidupan politik sehari-hari, baik biaya (*costs*) maupun manfaat (*benefits*) tidak selalu hadir dalam bentuk fisik-material.

Namun juga kedua aspek tersebut dapat diurai dalam bentuk nilai-nilai simbolik seperti trust, stabilitas, soladiritas, ataupun loyalitas.<sup>25</sup> Jika dilihat dari sisi tujuannya, menurut Nietzsche, kehidupan manusia adalah kehendak untuk berkuasa, dan ini harus diterjemahkan ke dalam kesempurnaan yang melebihi dimensi-dimensi biasa, kebaikan dan keburukan<sup>26</sup>, sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh sebab itu semakin jelas bahwa perlu mengingatkan pentingnya muatan etika politik sebagai acuan bersama bagi jagat perpolitikan.

### **Ruang Lingkup Etika Politik**

Dalam definisi Ricoeur, etika politik tidak hanya menyangkut perilaku individual saja, tetapi terkait dengan tindakan kolektif (etika sosial). Dalam etika individual, kalau orang mempunyai pandangan tertentu bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Sedangkan dalam etika politik, yang merupakan etika sosial, untuk dapat mewujudkan

---

<sup>25</sup>Sri Sultan Hamangkubowono X, *Pidato Dies* yang disampaikan dalam Temu Akbar Alumni Dies Natalis Ke-40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 3 Agustus 2008.

<sup>26</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 220.

pandangannya dibutuhkan persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara karena menyangkut tindakan kolektif.<sup>27</sup> Maka hubungan antara pandangan hidup seseorang dengan tindakan kolektif tidak langsung, membutuhkan perantara yang berfungsi menjembatani pandangan pribadi dengan tindakan kolektif.

Perantara itu bisa berupa simbol-simbol maupun nilai-nilai: simbol-simbol agama, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan sebagainya. Melalui simbol-simbol dan nilai-nilai itu, politikus berusaha meyakinkan sebanyak mungkin warganegara agar menerima pandangannya sehingga mendorong kepada tindakan bersama. Maka politik disebut seni karena membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan melalui wicara dan persuasi, bukan manipulasi, kebohongan, dan kekerasan. Agaknya hal demikian inilah yang mendorong T. Jakob bersuara lantang menuturkan. "Wahai pemimpin jaga kesehatanmu", wahai pemimpin bersungguh-sungguhlah sedikit", wahai pemimpin wariskan kecerdasan".<sup>28</sup> Ilustrasi ini menandakan bahwa secara etika politik, pemimpin itu harus bersungguh-sungguh memimpin tidak boleh bersikap autopilot, dan juga harus cerdas dan visioner, sehingga akuntabilitas kepemimpinan mendapat *public trust*.

Etika politik akan kritis terhadap manipulasi atau penyalahgunaan nilai-nilai dan simbol-simbol itu. Ia berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengkondisikan tindakan kolektif. Etika politik vs Machiavellisme Tuntutan pertama etika politik adalah "hidup baik bersama dan untuk orang lain". Pada tingkat ini, etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warganegara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, dan tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang

---

<sup>27</sup>Dengan kata lain, Paul Ricoeur menegaskan bahwa etika politik membidik hidup baik bersama, lihat, Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003), h. 240.

<sup>28</sup>T. Jacob, *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis, Catatan di Senjakala*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 255-264.

## M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK..

menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.<sup>29</sup>

Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas. Politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak bila ada pengakuan timbal balik dan hubungan fair di antara para pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas bila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Belum mencukupi karena tidak berbeda dengan pernyataan. "Bila setiap politikus jujur, maka Indonesia akan makmur".

Dari sudut koherensi, pernyataan ini sah, tidak terbantahkan. Tetapi dari teori korespondensi, pernyataan hipotesis itu terlalu jauh dari kenyataan (hipotesis irealis). Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan real politic, cenderung mandul. Namun bukankah real politic, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subyek hukum, tetapi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang saling berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apa pun caranya. Filsuf Italia ini yakin tidak ada hukum kecuali kekuatan yang dapat memaksanya. Hanya sesudahnya, hukum dan hak akan melegitimasi kekuatan itu. Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan.

---

<sup>29</sup>Seorang negarawan itu, pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya, ia mementingkan kepentingan rakyat dan negara, oleh karena itu, menurut Ibnu Miskawaih, negarawan itu memiliki keutamaan-keutamaan moral, kebajikan yang tinggi, yaitu memiliki kearifan, sikap sederhana, berani, dermawan dan adil. Lihat, Abu Ali Ahmad Miskawaih, *Tahdzîbul al-Akhlâk*, terj. Helmi Hidayat, (Bandung : Mizan, 1999), h. 46-50.

Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk menjinakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Institusi sosial dan keadilan prosedural Institusi-institusi sosial harus adil karena mempengaruhi struktur dasar masyarakat. Dalam struktur dasar masyarakat, seperti dikatakan John Rawls, sudah terkandung berbagai posisi sosial dan harapan masa depan anggota masyarakat berbeda-beda dan sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial-ekonomi. Terlebih lagi, institusi-institusi sosial tertentu mendefinisikan hak-hak dan kewajiban masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan setiap orang, cita-citanya, dan kemungkinan terwujudnya.<sup>30</sup>

Dengan demikian institusi-institusi sosial itu sudah merupakan sumber kepincangan karena sudah merupakan titik awal keberuntungan bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain. Maka membangun institusi-institusi yang adil adalah upaya memastikan terjaminnya kesempatan sama sehingga kehidupan seseorang tidak pertama-tama ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihannya. Keutamaan moral politikus tidak cukup tanpa adanya komitmen untuk merombak institusi-institusi sosial yang tidak adil, penyebab laten kekerasan yang sering terjadi di Indonesia. Maka sering didengar pepatah "yang jujur hancur". Ungkapan ini menunjukkan urgensi membangun institusi-institusi yang adil. Ini bisa dimulai dengan menerapkan keadilan prosedural.

Indonesia sebagai negara demokrasi, tentu saja tidak memaksakan pandangan Rousseau, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*), persoalan ini masih *debatable*, yang jelas

---

<sup>30</sup> Haryatmoko, pengajar filsafat di Pascasarjana UI, Universitas Sanata Dharma, dan IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta Sumber: [http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika\\_politik\\_bukan\\_hanya\\_moralitas.htm](http://tumasouw.tripod.com/artikel/etika_politik_bukan_hanya_moralitas.htm)



kalangan Islam tidak setuju.<sup>31</sup>Rousseau justru menganjurkan konsep *civic religion*, yang akan menanamkan patriotisme dan kebaikan. Dalam konteks negara kota, ia menginginkan kesetaraan semua warga negara.<sup>32</sup> Agaknya dengan konsep kesetaraan semua warga negara ini maka keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya, sebagai sebuah pengejawantahan etika politik dalam negara .

Keadilan prosedural adalah hasil persetujuan melalui prosedur tertentu dan mempunyai sasaran utama peraturan-peraturan, hukum-hukum, undang-undang. Jadi prosedur ini terkait dengan legitimasi dan justifikasi. Misalnya, kue tart harus dibagi adil untuk lima orang. Maka peraturan yang menetapkan "yang membagi harus mengambil pada giliran yang terakhir" dianggap sebagai prosedur yang adil. Dengan ketentuan itu, bila pembagi ingin mendapat bagian yang tidak lebih kecil dari yang lain, dengan sendirinya, tanpa harus dikontrol, dia akan berusaha membagi kue itu sedemikian rupa sehingga sama besarnya.

Dengan demikian, meski ia mengambil pada giliran terakhir, tidak akan dirugikan. Di Indonesia, para penguasa, yang dalam arti tertentu adalah pembagi kekayaan atau hasil kerja sosial, justru sebaliknya, berebut untuk mengambil yang pertama. Tentu saja akan mengambil bagian yang terbesar. Maka banyak orang atau kelompok yang mempengaruhi semua untuk berebut kekuasaan. Keadilan prosedural menjadi tulang punggung etika politik karena sebagai prosedur sekaligus mampu mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan. Nampaknya di sini motif dalam menegakkan keadilan memegang peranan penting, sebab orang

---

<sup>31</sup>Perbedaan paradigma tentang demokrasi antara pemikiran Sekuler barat dengan Islam ini, Lihat Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta : Robbani Press, 1998), h. 178-183.

<sup>32</sup>Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, (yogyakarta : Qalam, 2004), h. 32-33.

yang hina dan keji menafsirkan perilaku dan karakter orang lain menurut motif-motif kotornya sendiri.<sup>33</sup>

Keadilan tidak diserahkan kepada keutamaan politikus, tetapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang baik sehingga keadilan distributif, komutatif, dan keadilan sosial bisa dijamin. Dengan demikian sistem hukum yang baik juga menghindarkan pembusukan politikus. Memang, bisa terjadi meski hukum sudah adil, seorang koruptor divonis bebas karena beberapa alasan kepiawaian pengacara, tak cukup bukti, tekanan terhadap hakim, dan sebagainya. Padahal, prosedur hukum positif yang berlaku tidak mampu memuaskan rasa keadilan, penyelesaiannya harus mengacu ke prinsip *epieikeia* (yang benar dan yang adil).<sup>34</sup>

Semua diperlakukan sama di depan hukum. Ketidaksamaan perlakuan hanya bisa dibenarkan bila memihak kepada yang paling tidak diuntungkan atau korban. Secara struktural, korban biasanya sudah dalam posisi lemah, misalnya, warga terhadap penguasa, minoritas terhadap mayoritas. Prinsip *epieikeia* ini mengandaikan integritas hakim, penguasa atau yang berkompeten menafsirkan hukum. Maka ada tuntutan timbal balik, prosedur yang adil belum mencukupi bila tidak dilaksanakan oleh pribadi yang mempunyai keutamaan moral.

---

<sup>33</sup>Dalam konteks ini Ali as berkata :”seorang jahat tidak mempunyai pandangan baik tentang siapa pun, karena ia tidak melihat siapa pun kecuali melalui perantaraan karakternya sendiri”. Lihat, Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Etika dan Pertumbuhan Spiritual*, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 320.

<sup>34</sup> Pelanggaran etika politik oleh elite penguasa dapat dirasakan oleh publik ketika nampak hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Agaknya orientasi kekuasaan oleh elite politik belum di arahkan kepada pemberdayaan ummat (*ri’ayah ummah*). Kekuasaan atas politik dan negara seyogyanya didedikasikan untuk Tuhan (Amanah) juga kepada rakyat dan negara. Lihat, Zuhairi Misrawi, “Fiqih *ivil Society* Versus Fikih Kekuasaan” dalam, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF,(Ed.). *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta : Paramadina, 2005), h. 284-285.

### **Penutup**

Marwah bangsa sangat ditentukan oleh etika politik elite penguasa. Etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, karena ia berfungsi sebagai ilmu, dalam membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggung-jawabkannya sendiri. Etika kajiannya lebih radikal, abstrak dan filosofis, oleh karena itu, etika politik adalah seni memimpin, seni berkuasa yang sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku serta nilai-nilai sosial, adat istiadat dan agama sebagai sumber nilai yang dapat membuat bangsa ini menjadi bermartabat dan berkeadaban.

Optimisme akan tegaknya etika politik dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara, manakala wawasan ilmu pengetahuan para elite bangsa memang terpenuhi, kapabilitas dan kompetensi sebagai negarawan memang harus mumpuni. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga muatan etika politik yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Pertama*, watak baru yang berakar budaya, berwatak progresif dan memihak bangsa. *Kedua*, kebhinnekaan, kebersamaan, kerukunan, dan kebangsaan Indonesia perlu dirajut ulang serta Pancasila ditegakkan kembali. *Ketiga*, membela rasa keadilan rakyat, mengabdikan diri demi kesejahteraan rakyat dan kemuliaan negara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*, Yogyakarta : Qalam, 2004.
- Amin, Ahmad, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

- Brandt, Richard B. *Ethical Theory, The Problems of Normative and Critical Ethics*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, Inc, 1959.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai pustaka, 1995.
- Djatnika, Rachmat, *Sistem Ethika Islam (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakart : Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Imarah, Muhammad, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, Jakarta : Robbani Press, 1998.
- Jacob, T., *Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis, Catatan di Senjakala*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Jurjani, Muhammad Al-, *at-Ta'rifat*, Singapore: al-Haramain, 1321. H.
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, Terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Lari, Sayyid Mujtaba Musawi, *Etika dan Pertumbuhan Spiritual*, Jakarta : Lentera, 2001.
- Lillie William, *An Introduction to Ethics*, New York: Barnes Noble, 1957.
- Madjid, Nurcholish, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Magnis, Franz Van, *Etika Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Mawardi, Abu al-Hasan al-, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Mesir : Al-Mathba'ah al-Amiriyyah, 1375 H/ 1955.

M. Sidi Ritaudin: WAWASAN ETIKA POLITIK..

- Miskawaih, Abu Ali Ahmad, *Tahdzîbul al-Akhlâk*, terj. Helmi Hidayat, Bandung : Mizan, 1999.
- Miskawaih, Ibn, *Tahzib al-Akhlak*, Terj. Helmi Hidayat “*Menuju Kesempurnaan Akhlak*” Bandung: Mizan, 1999.
- Misrawi, Zuhairi, “*Fiqih ivil Society Versus Fikih Kekuasaan*” dalam, Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF,(Ed.,). *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta : Paramadina, 2005.
- Nasution, Harun, (Ket.Tim), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ritaudin, M. Sidi, *Etika Politik Islam,(Buku Daras)*, Jakarta : Transmisi Media, 2009.
- Sasono, Adi,. “*Moral Agama dan Masalah Kemiskinan Pengantar Kajian Tentang Misi Islami dalam Pembangunan Nasional*”, dalam, M. Amien Rais, Ed, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta : Srigunting, RajaGrafindo Persada, 1996.
- Syukur, Suparman, *Etika Religius*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Wellman, Carl, *Morals and Ethics*, New Jersey: Prentice-Hall, 1988.